



**LAPORAN  
KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
(LKjIP)**

**BAPPEDA KOTA BANDA ACEH  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2021.

LkjIP Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2021 disusun sebagai bahan evaluasi atas rangkaian Program yang telah direncanakan di awal tahun anggaran 2021 dan sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah untuk tahun berikutnya dengan mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga salah satu keberhasilan sasaran berdasarkan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang ditetapkan dapat diukur dengan jelas.

Akhir kata, masukan dan saran yang konstruktif masih sangat diperlukan sebagai bahan analisa dan evaluasi untuk terus melakukan perbaikan pelayanan publik secara komprehensif dalam mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik oleh Bappeda Kota Banda Aceh pada masa mendatang.

**Banda Aceh, 17 Januari 2022**

**η Kepala Bappeda Kota Banda Aceh** 



**WERI, SE, MA**

**Pembina Tk. I**

**NIP. 19640525 198903 1 026**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	2
1.3. Isu Strategis .....	2
1.4. Gambaran Umum Organisasi.....	3
1.5. Dasar Hukum .....	7
<b>BAB II    PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	<b>1</b>
2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	1
2.2. Rencana Kerja, Program, dan Kegiatan .....	2
2.3. Penetapan Kinerja .....	14
2.4. Penganggaran Kegiatan .....	16
<b>BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>1</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	1
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	3
3.3. Akuntabilitas Keuangan.....	4
3.4. Keberhasilan dan Hambatan.....	10

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2021 disusun sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan program dan kegiatan oleh Bappeda Kota Banda Aceh pada Tahun 2021 dengan berorientasi pada hasil (outcome) yang ingin dicapai. LKjIP Bappeda Kota Banda Aceh mengacu pada Penetapan Kinerja (performance agreement) yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2021 untuk mencapai sasaran strategis (performance goal) Bappeda Kota Banda Aceh yaitu “Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif”. Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis Bappeda Kota Banda Aceh tersebut, ditetapkanlah indikator sasaran strategis (performance indicator) yang kemudian ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Banda Aceh. Adapun Indikator sasaran strategis Bappeda Kota Banda Aceh terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu:

1. Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD;
2. Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD; dan
3. Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target

Adapun sistematika penyajian LKjIP Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Cakupan LKjIP Kota Banda Aceh Tahun 2021 terdiri atas:

- a. Bab I Pendahuluan, terdiri dari:
  1. Latar belakang;
  2. Maksud dan tujuan;
  3. Isu strategis;
  4. Gambaran Umum Organisasi; dan
  5. Dasar hukum.
- b. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, terdiri dari:
  1. Uraian singkat visi dan misi RPJMD Kota Banda Aceh periode 2017-2022 serta hubungannya dengan sasaran strategis Bappeda;
  2. Rencana Kerja, Program dan Kegiatan;
  3. Penetapan Kinerja; dan
  4. Penganggaran Kegiatan.


- c. Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari:
1. Capaian Kinerja Organisasi;
  2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja;
  3. Akuntabilitas Keuangan; dan
  4. Keberhasilan dan Hambatan.

Secara keseluruhan hasil pencapaian kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2021 dapat terlihat dari rata-rata persentase realisasi terhadap target indikator sasaran pada tahun 2021 mencapai **94,75 persen** yang berarti bahwa Skala Nilai Peringkat Kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2021 berada pada kriteria **sangat tinggi**.

Tahun Anggaran 2021, realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bappeda cukup baik dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 9.349.027.544,- atau **84,33 persen** dari alokasi anggaran belanja Bappeda sementara anggaran belanja yang tidak terealisasi sebesar Rp. 1.737.017.861,- atau 15,67 persen. Hal ini disebabkan karena beberapa kegiatan sudah dilaksanakan namun pembayarannya harus tertunda dan dicatat sebagai utang pada neraca dan dibayarkan pada tahun anggaran 2022 dikarenakan rendahnya pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Banda Aceh yang disebabkan efek dari pandemic covid-19 sehingga berpengaruh pada pembayaran kegiatan pada akhir tahun anggaran.

Keberhasilan dan kekurangan yang telah dicapai selama Tahun 2021 memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Bappeda Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga sasaran strategis yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Banda Aceh periode Tahun 2017-2022 dapat terwujud.

Banda Aceh, 17 Januari 2022  
Kepala Bappeda Kota Banda Aceh

  
**WERI, SE, MA**  
Pembina Tk. I

NIP. 19640525 198903 1 026

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Setiap instansi Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban instansi dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Maksud Akuntabilitas Kinerja dalam Instruksi Presiden ini adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui alat pertanggungjawaban secara periodik yang disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama setahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Hal yang paling utama untuk diinformasikan dalam LKjIP adalah yang mencakup capaian kinerja tahun berjalan yang merupakan perbandingan antara realisasi dengan rencana tahun tersebut.

Selain itu, penyusunan LKjIP merupakan amanat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Tata cara penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana proses penyusunan LKjIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis instansi sehingga esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah dapat diukur dan diwujudkan.

### **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan LKjIP Kota Banda Aceh adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kota Banda Aceh selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP Bappeda Kota Banda Aceh juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja Bappeda Kota Banda Aceh.

Penyusunan LKjIP Bappeda Kota Banda Aceh bertujuan untuk:

1. Menyajikan informasi kinerja berupa hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja Bappeda tahun 2021, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil;
2. Menguraikan aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran daerah yang dibelanjakan pada tahun 2021 dengan hasil atau manfaat yang diperoleh (akuntabilitas keuangan); dan
3. Menguraikan secara singkat hubungan antara capaian pelaksanaan Renstra Bappeda periode tahun 2017-2022 melalui realisasasi pelaksanaan Renja tahun 2021, beserta sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021 dan kaitannya dengan capaian tujuan yang hendak dicapai oleh Bappeda Kota Banda Aceh periode tahun 2017-2022, yaitu **meningkatnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif.**

### **1.3. Isu Strategis**

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda sebagai lembaga teknis perencanaan pembangunan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintah daerah, ada beberapa permasalahan utama yang menjadi Isu strategis (strategic issues) berdasarkan gambaran kondisi saat ini serta kondisi yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Adapun permasalahan tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan yang berbasis mitigasi bencana, mengingat kota Banda Aceh termasuk daerah rawan bencana, terutama gempa dan tsunami;
2. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, terutama perencanaan sektoral, diharapkan sesuai dengan komitmen nasional dan menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang baru;

3. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sarana dan prasarana wilayah dan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan tata ruang wilayah dan pengelolaan lingkungan; dan
4. Mengoptimalkan Koordinasi antar OPD dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah, terutama dalam usaha pencapaian misi ke 5 walikota Banda Aceh periode tahun 2017-2022 yaitu **Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik**, yang menjadi tupoksi Bappeda Kota Banda Aceh.

#### **1.4. Gambaran Umum Organisasi**

##### **1.4.1. Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 62 Tahun 2016, struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Pimpinan yaitu: Kepala Badan
- b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat, yang terdiri dari:
  1. Subbagian Program dan Pelaporan
  2. Subbagian Keuangan
  3. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset
- c. Unsur Pelaksana terdiri dari:
  1. Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi, membawahi:
    1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
    2. Subbidang Pengintegrasian dan Harmonisasi Program; dan
    3. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.
  2. Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan, membawahi:
    1. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
    2. Subbidang Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan; dan
    3. Subbidang Kelembagaan dan Keistimewaan.
  3. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi:
    1. Subbidang Pengembangan Industri, Perdagangan, Ketenagakerjaan, dan Pemberdayaan Masyarakat
    2. Subbidang Pengembangan Keuangan Daerah dan Investasi dan
    3. Subbidang Sumber Daya Alam dan Ketahanan Pangan.



4. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
  1. Subbidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan
  2. Subbidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penanggulangan Bencana; dan
  3. Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksanaan Teknis Badan

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Sistem Informasi Geografis adalah unsur pelaksana teknis di bidang Basis Data Geospasial dan Sistem Informasi Geografis di Kota Banda Aceh, pembentukan Badan (UPTB) SIG berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Sistem Informasi Geografis Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh

1. Susunan Organisasi UPTB SIG terdiri dari :
  - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Tim Ahli Sistem Informasi Geografis; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **1.4.2. Sumber Daya Manusia di Bappeda Kota Banda Aceh**

Sumber daya aparatur merupakan salah satu faktor penunjang untuk peningkatan kinerja. Kondisi pegawai Bappeda Kota Banda Aceh 31 Desember 2021 sebanyak 66 orang, PNS sebanyak 46 orang, dan Non PNS sebanyak 16 orang, serta tenaga ahli 4 (empat) orang. Klasifikasi Jumlah pegawai Bappeda berdasarkan jabatan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.1. dan tabel 1.2 berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselonering**

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Kepala	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala bidang	4
4	Kepala UPTB	1
5	Kasubbag/Perencana Ahli Muda	3
6	Kasubbid/Perencana Ahli Muda	11
7	Kepala TU UPTB	1
	Jumlah	21

Sumber : Data Pegawai Bappeda Kota Banda Aceh 2021

**Tabel 1.2**  
**Tingkat Pendidikan Pegawai Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2021**

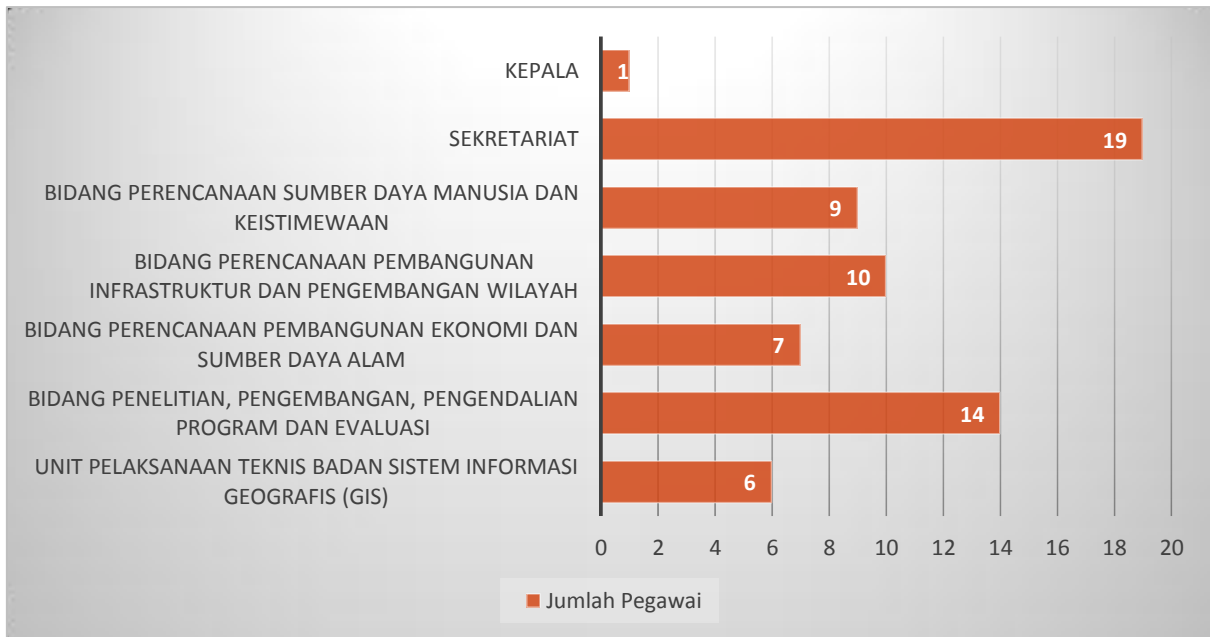
No	Tingkat	Jumlah (orang)
1	S3	1
2	S2	19
3	S1	36
4	Diploma/Sederajat	4
5	SMA/Sederajat	5
6	SMP/Sederajat	1
7	SD/Sederajat	-
	Jumlah	66

Sumber : Data Pegawai Bappeda Kota Banda Aceh 2021

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas diketahui bahwa Pegawai Bappeda Kota Banda Aceh terbanyak pada Strata 1 sebanyak 36 orang, diikuti oleh Strata 2 sebanyak 19 orang, dengan kondisi eksisting saat ini dengan beban kerja yang cukup berat Bappeda masih membutuhkan tenaga staf di bidang perencanaan pembangunan.

Adapun sebaran jumlah pegawai Bappeda Kota Banda Aceh menurut bidang dapat dilihat pada Grafik 1.1 di bawah ini:

**Grafik 1.1**  
**Pegawai Bappeda Kota Banda Aceh Menurut Bidang Tahun 2021**



Sumber: Data Pegawai Bappeda Kota Banda Aceh 2021

#### 1.4.3. Sarana dan Prasarana

Dalam hal sarana dan prasarana untuk mendukung pencapaian kinerja di Tahun 2021 Bappeda Kota Banda Aceh telah memiliki Aset seperti yang dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 1.3**  
**Buku Inventaris**

No	Nama Barang	Jumlah	JumlahHarga
1	Tanah	1 parsial	6.336.087.000
2	Gedung dan Bangunan	4 unit	3.546.148.000
3	Peralatan dan Mesin	829 unit	4.248.083.720
4	Instalasi	2 unit	123.601.000
5	Aset Tetap lainnya	1	420.000
<b>Jumlah</b>			<b>14.254.339.720</b>

Sumber: Buku Inventaris, 2020

### **1.5. Dasar Hukum**

Landasan hukum penyusunan LKjIP Bappeda Tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; dan
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2017 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Banda Aceh**

Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banda Aceh tahun 2017-2022 adalah:

**“Terwujudnya Kota Banda Aceh GEMILANG dalam bingkai Syariah”**

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah:

1. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, syariah dan akhlak Memperkuat sistem perencanaan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik;
6. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2017-2022 serta sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan Bappeda maka fungsi dan tugas Bappeda terkait erat dengan pencapaian misi ke-5, yaitu **“Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik”**.

Untuk mendukung pencapaian misi tersebut, maka Bappeda Kota Banda Aceh di dalam Renstra Bappeda periode tahun 2017-2022 menetapkan tujuan dan sasaran strategis Bappeda Kota Banda Aceh. Tujuan dan sasaran Strategis Bappeda Kota Banda Aceh ditetapkan untuk prioritas perencanaan program dan kegiatan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Bappeda Kota Banda Aceh selama lima tahun.

Berikut disajikan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Banda Aceh:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>Misi 5 RPJM 2017-2022 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas, Aspiratif dan Aplikatif	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Selaras Dan Aplikatif	1. Membangun komitmen antar pelaku pembangunan untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan perencanaan 2. Membangun sistem database yang dapat diakses secara online	1. Menyusun dokumen perencanaan yang partisipatif dan sinergi dengan dokumen perencanaan lainnya 2. pemeliharaan database yang terkoneksi dengan OPD

*Sumber: Renstra Bappeda 2017-2022*

## **2.2 Rencana Kerja, Program, dan Kegiatan Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2021**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Bappeda Kota Banda Aceh menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai setiap tahun. Target kinerja tahun 2021 direncanakan menyesuaikan dengan Renstra Bappeda kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021.

Bappeda pada Tahun anggaran 2021 telah melaksanakan melaksanakan Program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

### **Penunjang:**

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

- 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - 1.1.1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  - 1.2.1. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
  - 1.2.2. Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
  - 1.3.1. sub kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.

- 1.3.2. sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
  - 1.4.1. sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
  - 1.4.2. sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  - 1.4.3. sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan.
  - 1.4.4. sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - 1.5.1. sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - 1.6.1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik.
  - 1.6.2. sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - 1.7.1. sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
  - 1.7.2. Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.
  - 1.7.3. sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

**Urusan Perencanaan:**

**1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.**

- 1.1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.
  - 1.1.1. Sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.
  - 1.1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota.
  - 1.1.3. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

- 1.2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - 1.2.1. sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 1.3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - 1.3.1. Sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota.
  - 1.3.2. sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

## **2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.**

- 2.1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
  - 2.1.1. Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
  - 2.1.2. sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- 2.2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).
  - 2.2.1. Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
  - 2.2.2. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.
  - 2.2.3. Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- 2.3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
  - 2.3.1. sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
  - 2.3.2. sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.



- 2.3.3. sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

**Urusan Penelitian:**

**1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.**

- 1.1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.
  - 1.1.1. sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial.
- 1.2. Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan.
  - 1.2.1. sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah.
  - 1.2.2. sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup.
  - 1.2.3. sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum.
  - 1.2.4. sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan.
- 1.3. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
  - 1.3.1. sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.
  - 1.3.2. sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan.

Adapun hubungan program dan kegiatan tersebut terhadap pencapaian sasaran strategis dan indikator sasaran strategis Bappeda Kota Banda Aceh untuk tahun 2021 diuraikan dalam Tabel 2.2 berikut:

**Tabel 2.2**  
**Rencana Kinerja Tahun 2021**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
		<b>1.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah</b>	<b>100%</b>
		1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Bappeda yang tersusun	100%
		1.1.1	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	13 Dokumen
		1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%
		1.2.1	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	12 Bulan
		1.2.2	Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran yang disediakan	12 Bulan
		1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
		1.3.1	Sub kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang disediakan	67 stel

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
		1.3.2	Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 Pegawai
		1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	100%
		1.4.1	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7 Jenis
		1.4.2	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Jenis
		1.4.3	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	9 Jenis
		1.4.4	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	40 Laporan
		1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
		1.5.1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	12 Bulan
		1.5.2	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
		1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
		1.6.1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11 Unit
		1.6.2	Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	114 Unit
		1.6.3	Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	1 Unit
<b>Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif</b>	<b>Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD</b>	2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kegiatan pembangunan daerah yang terlaksana sesuai dokumen perencanaan	100%
		2.1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan daerah	100%
		2.1.1	Sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah jenis usulan program dan kegiatan daerah yang didanai oleh Sumber-sumber dana lainnya	2 Jenis
		2.1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang	250 Orang

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	
			2.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RKPD yang tersusun	2 Dokumen
			2.2	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan daerah	100%
			2.2.1	Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah jenis data perencanaan dan aplikasi yang dikelola	3 Jenis
			2.3	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah	100%
			2.3.1	Sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Banda Aceh	2 Dokumen
			2.3.2	Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	3 Laporan
	<b>Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD</b>	3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah yang sinkron dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
		3.1	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang selaras dengan perencanaan daerah	100%
		3.1.1	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang pemerintahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	25 Dokumen
		3.1.2	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang pembangunan manusia yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	50 Dokumen
		3.2	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA yang selaras dengan perencanaan daerah	100%
		3.2.1	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	60 Dokumen
		3.2.2	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah kota Banda Aceh	1 Laporan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	
			3.2.3	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang SDA yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	30 Dokumen
		3.3	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang selaras dengan perencanaan daerah	100%
			3.3.1	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang infrastruktur yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	30 Dokumen
			3.3.2	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional bidang infrastruktur	2 Laporan
			3.3.3	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang kewilayahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	25 Laporan
	<b>Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD</b>	4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase dokumen perencanaan daerah yang didasarkan pada hasil analisa penelitian dan pengembangan	100%

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target		
	<b>yang mencapai target</b>		4.1	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tersedianya dokumen penelitian pengembangan bidang sosial dan kependudukan	1 Dokumen	
				4.1.1	Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian Sosial	1 Dokumen
			4.2	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan	Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	6 Dokumen	
				4.2.1	Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah	Jumlah laporan survey pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah	2 Laporan
				4.2.2	Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan penelitian bidang lingkungan hidup	2 Laporan
				4.2.3	Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah laporan hasil survey Indeks Kota Layak Huni	1 Laporan
				4.2.4	Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah laporan penelitian bidang penataan ruang dan pertanahan	1 Laporan
				4.3	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tersedianya dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	2 Dokumen
			4.3.1	Sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan	Jumlah laporan penelitian dibidang teknologi dan informasi	2 Laporan	



Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Target
					Inovasi		
				4.3.2	Sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah laporan Informasi Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	3 Laporan

*Sumber: RKT Bappeda Banda Aceh Tahun 2021*

### 2.3 Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah unit kerja yang menerima amanah atau tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah atau tanggung jawab atau kinerja yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Pada tahun 2021 alokasi belanja langsung Bappeda Banda Aceh sesuai dengan yang telah diperjanjikan dengan Walikota Banda Aceh sebesar Rp. **12.372.380.505,-** dengan Indikator dan target kinerja sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	1.1 Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	82% (151 Program RKPD yang Selaras dari 184 Program RPJMD)
		1.2 Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	100% (44 OPD dari 44 OPD)
		1.3 Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	80% (16 Indikator dari 20 Indikator Kinerja RPJMD)

**Tabel 2.4**  
**Alokasi Anggaran per Program Tahun 2021**

	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.126.072.055	
2	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.148.976.450	Mendukung Indikator Kinerja Persentase Keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	817.302.200	Mendukung Indikator Kinerja Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.280.029.800	Mendukung Indikator Kinerja Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target
	<b>JUMLAH</b>	<b>12.372.380.505</b>	

#### **2.4 Penganggaran Kegiatan**

Pada Tahun Anggaran 2021 Bappeda Kota Banda Aceh melaksanakan Program/kegiatan dengan rincian anggaran seperti dijelaskan pada Tabel 2.5 berikut:

**Tabel 2.5**  
**Penganggaran Kegiatan Tahun 2021**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Anggaran sebelum perubahan (Rp)	Anggaran setelah perubahan (Rp)
		1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah</b>	7,126,072,055	6,864,446,255
		1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Bappeda yang tersusun		
		1.1.1	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	45,960,650	39,607,500
		1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan		
		1.2.1	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	5,070,940,905	5,070,940,905
		1.2.2	Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran yang disediakan	647,100,000	1,020,300,000
		1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
		1.3.1	Sub kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang disediakan	36,850,000	0
		1.3.2	Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15,000,000	0

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Anggaran sebelum perubahan (Rp)	Anggaran setelah perubahan (Rp)
		1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum		
		1.4.1	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4,026,000	4,026,000
		1.4.2	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	68,953,000	28,928,650
		1.4.3	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	25,329,000	12,835,000
		1.4.4	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	400,000,000	151,671,700
		1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
		1.5.1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	314,080,000	314,080,000
		1.5.2	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	143,492,000	99,448,000
		1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Anggaran sebelum perubahan (Rp)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	
			1.6.1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	102,724,000	80,199,000
			1.6.2	Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	30,201,500	26,659,500
			1.6.3	Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	221,415,000	15,750,000
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	2.	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>		Persentase kegiatan pembangunan daerah yang terlaksana sesuai dokumen perencanaan	3,148,976,450	2,582,983,000
		2.1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan daerah		
			2.1.1	Sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah jenis usulan program dan kegiatan daerah yang didanai oleh Sumber-sumber dana lainnya	83,865,450	42,265,000
			2.1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang	321,899,000	207,866,000
			2.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RKPD yang tersusun	2,041,910,000	2,143,430,000

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Anggaran sebelum perubahan (Rp)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	
		2.2	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan daerah			
		2.2.1	Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah jenis data perencanaan dan aplikasi yang dikelola	467,252,000	109,795,000	
		2.3	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah			
		2.3.1	Sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Banda Aceh	117,127,000	57,804,500	
		2.3.2	Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	116,923,000	21,822,500	
	<b>Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD</b>	3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah yang sinkron dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	817,302,200	434,698,450
3.1		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang selaras dengan perencanaan daerah			

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Anggaran sebelum perubahan (Rp)	Anggaran setelah perubahan (Rp)
		3.1.1	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang pemerintahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	75,088,900	58,225,700
		3.1.2	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang pembangunan manusia yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	139,285,000	67,017,500
		3.2	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA yang selaras dengan perencanaan daerah		
		3.2.1	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	88,428,900	45,284,700
		3.2.2	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah kota Banda Aceh	136,825,000	74,852,550
		3.2.3	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang SDA yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	63,722,000	32,294,500



Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Anggaran sebelum perubahan (Rp)	Anggaran setelah perubahan (Rp)
		3.3	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang selaras dengan perencanaan daerah		
		3.3.1	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang infrastruktur yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	68,047,650	34,072,500
		3.3.2	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional bidang infrastruktur	189,332,000	94,691,000
		3.3.3	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang kewilayahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	56,572,750	28,260,000
	<b>Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target</b>	4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase dokumen perencanaan daerah yang didasarkan pada hasil analisa penelitian dan pengembangan	1,280,029,800	1,203,917,700
		4.1	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tersedianya dokumen penelitian pengembangan bidang sosial dan kependudukan		
		4.1.1	Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian Sosial	196,159,000	154,534,500

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Anggaran sebelum perubahan (Rp)	Anggaran setelah perubahan (Rp)
		4.2	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan	Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan		
		4.2.1	Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah	Jumlah laporan survey pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah	153,753,800	139,526,900
		4.2.2	Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan penelitian bidang lingkungan hidup	213,024,800	199,202,900
		4.2.3	Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah laporan hasil survey Indeks Kota Layak Huni	113,324,300	107,623,400
		4.2.4	Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah laporan penelitian bidang penataan ruang dan pertanahan	101,795,000	100,897,500
		4.3	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tersedianya dokumen pengembangan inovasi dan teknologi		
		4.3.1	Sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah laporan penelitian dibidang teknologi dan informasi	403,490,000	401,882,500
		4.3.2	Sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah laporan Informasi Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	98,482,900	100,250,000

Sumber: DPPA Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2021 (diolah)

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, organisasi seperti yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Untuk menentukan tingkat capaian kinerja tersebut dibutuhkan suatu pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai, dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2021, dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian indikator kinerja, sehingga terlihat apakah target yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja seperti dijelaskan pada Tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah
<b>Sumber: Lampiran VII-C Permendagri Nomor 54 Tahun 2010</b>		

Indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari sasaran strategis Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Sasaran Strategis Bappeda Tahun 2021**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN		PROGRAM	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2021	REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2021 (%)
1	2		3	4	5	6
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	1	Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	82%	94.73%	115.52%
	2	Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	Program koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	44 OPD	44 OPD	100%
	3	Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	80%	55%	68.75%
<b>Rata-Rata Persentase Realisasi</b>					<b>94.75</b>	

Berdasarkan Tabel 3.2 diatas terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang terbagi dalam 3 (tiga) indikator sasaran strategis, maka jika dilihat dari Tabel 3.2 rata-rata persentase realisasi terhadap target indikator sasaran pada tahun 2021 mencapai **94.75%**, yang berarti bahwa Skala Nilai Peringkat Kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2021 berada pada kriteria **sangat tinggi**.

Bappeda tidak memiliki indikator yang diatur sesuai SPM/standar nasional maupun Indikator Kinerja Kunci. Indikator kinerja Bappeda kota Banda Aceh sesuai Renstra Bappeda tahun 2017–2022, diukur dari lima (5) indikator. Namun demikian, akibat adanya perubahan kodefikasi dan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dua (2) dari lima (5) indikator Bappeda tidak dapat diukur karena tidak selarasnya program kegiatan lama dengan yang baru juga akibat adanya perubahan pemakaian aplikasi perencanaan dan penganggaran yang semula menggunakan aplikasi lokal yaitu I-Ren menjadi aplikasi terintegrasi yaitu SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) sejak Tahun Anggaran 2021 sesuai arahan Kemendagri.

Oleh sebab itu pada tahun 2021 dan 2022, atau di dua (2) tahun terakhir masa Renstra Bappeda tahun 2017 – 2022, hanya tiga (3) indikator sasaran yang dapat diukur yaitu: Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD; Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD; dan Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target. Sedangkan dua (2) indikator lainnya dalam Renstra Bappeda yaitu Persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD dan Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan, hanya dapat diukur hingga tahun 2021.

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2021 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022. Mengacu pada Renstra tersebut, kemudian difokuskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022.

Perbandingan capaian kinerja Bappeda terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2020-2021 dijelaskan dalam Tabel 3.3 sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2020 dengan Tahun 2021**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN TAHUN 2020 (%)	CAPAIAN TAHUN 2021 (%)
1	2	3	4
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	1 Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	100	115.52
	2 Persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD	100	-
	3 Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	100	100
	4 Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	73.33%	68.75%
	5 Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan	100	-
<b>Rata-Rata Persentase Realisasi Per Tahun</b>		<b>94.66</b>	<b>94.75</b>

Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2021 dengan 2020 maka capaian pada tahun 2021 mengalami sedikit peningkatan dari 94.66% pada tahun 2020 meningkat menjadi 94.75 pada tahun 2021, yang berarti bahwa skala nilai Peringkat Kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2021 berada pada kriteria **sangat tinggi**.

Dilihat dari pencapaian indikator Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD sebesar 115.52 %, dan Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD sebesar 100% menunjukkan bahwa fungsi Bappeda dalam hal pembinaan, dan pengawasan di bidang perencanaan pembangunan daerah bisa dikatakan berhasil. Berhasilnya Bappeda dalam menjalankan khususnya fungsi tersebut menghasilkan konsistensi dan integrasi yang jelas antar dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan Daerah (RPJMD, RKPD) maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja). Selain itu dengan terjaganya konsistensi dan integrasi antar dokumen perencanaan tersebut maka keberhasilan pencapaian target kinerja salah satu dokumen perencanaan secara otomatis akan berkontribusi secara nyata terhadap dokumen perencanaan di atasnya. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Bappeda dalam mencapai target kinerja tahunan (Renja/ RKT) tahun 2021 telah mengungkit tercapainya sasaran Renstra Bappeda 2017-2022 dan sasaran RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2021, yang kemudian mengungkit pencapaian kinerja Sasaran RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022.

Adapun capaian terhadap indikator kinerja Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target, pada tahun 2021 hanya 11 (sebelas) IKU RPJMD yang mencapai target dari 16 (enam belas) IKU RPJMD yang ditargetkan pada tahun 2021, hal ini di antaranya disebabkan oleh refocusing dan relokasi belanja non prioritas untuk dialihkan pada upaya percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19.

Selain itu dampak pandemi Covid-19 juga mengakibatkan iklim usaha memburuk, tenaga kerja dikurangi dan pengangguran bertambah. Beberapa kegiatan pembayarannya harus tertunda dan dicatat sebagai utang pada neraca dan dibayarkan pada tahun anggaran 2022 dikarenakan rendahnya pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Banda Aceh yang disebabkan efek dari pandemic covid 19 sehingga berpengaruh pada pembayaran kegiatan pada akhir tahun anggaran.

Capaian Sasaran Strategis dan Realisasi Anggaran Kegiatan tahun 2021 pada tabel 3.4 berikut ini:

**Tabel 3.4**  
**Capaian Sasaran Strategis dan Realisasi Anggaran Kegiatan tahun 2021**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
		1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100%	100%	100%	6.864.446.255	6.584.066.394	95,92
		1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Bappeda yang tersusun	100%	100%	100%	39.607.500	39.607.500	100,00
		1.1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	13 Dokumen	13 Dokumen	100%	39.607.500	39.607.500	100,00
		1.2 kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	100%	100%	6.091.240.905	6.037.633.270	99,12
		1.2.1 Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100%	5,070,940,905	5.199.177.689	102,53
		1.2.2 Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100%	1,020,300,000	838.455.581	82,18
		1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	-	=	0	0	0

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)	
		1.3.1	Sub kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang disediakan	67 stel	--	-	0	0	
		1.3.2	Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 Pegawai	-	-	0	0	
		1.4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	100%	60%	60%	197.461.350	105.420.173	53,39
		1.4.1	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7 Jenis	7 Jenis	100%	4,026,000	1.725.000	42,85
		1.4.2	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Jenis	6 Jenis	100%	28,928,650	28.928.650	100,00
		1.4.3	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	9 Jenis	9 Jenis	100%	12,835,000	12.054.300	93,92
		1.4.4	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	40 Laporan	17 Laporan	42.5%	151,671,700	62.712.223	41,35



Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)	
		1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	413.528.000	310.916.151	75,19	
		1.5.1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	12 Bulan	12 Bulan	314,080,000	238.095.151	75,81	
		1.5.2	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	99,448,000	72.821.000	73,23	
		1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	80%	122.608.500	90.489.300	73,80	
		1.6.1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11 Unit	11 Unit	80,199,000	56.089.800	69,94	
		1.6.2	Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	114 Unit	32 Unit	26,659,500	18.649.500	69,95	
		1.6.3	Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	1 Unit	1 Unit	15,750,000	15.750.000	100,00	
<b>Terwujudnya perencanaan pembangunan</b>	<b>Persentase keselarasan Program</b>	<b>2.</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase kegiatan pembangunan daerah yang terlaksana sesuai dokumen</b>	<b>82%</b>	<b>94.73%</b>	<b>115.52%</b>	<b>2,582,983,000</b>	<b>2.323.596.600</b>	<b>89,96</b>

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)	
yang selaras dan aplikatif	RKPD terhadap RPJMD		<b>perencanaan</b>							
		2.1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan daerah	100%	100%	100%	2.393.561.000	2.262.877.600	94,54
		2.1.1	Sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah jenis usulan program dan kegiatan daerah yang didanai oleh Sumber-sumber dana lainnya	2 Jenis	2 Jenis	100%	42,265,000	41.040.000	97,10
		2.1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang	250 Orang	250 Orang	100%	207,866,000	165.118.600	79,44
		2.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RKPD yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2,143,430,000	2.056.719.000	95,95
		2.2	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	109.795.000	40.744.000	37,11
		2.2.1	Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah jenis data perencanaan dan aplikasi yang dikelola	3 Jenis	3 Jenis	100%	109,795,000	40.744.000	37,11
		2.3	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen evaluasi dan pelaporan kegiatan	100%	85%	85%	79.627.000	19.975.000	34,56

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)	
			pembangunan daerah							
		2.3.1	Sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Banda Aceh	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	57.804.500	19.975.000	34,56
		2.3.2	Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	3 Laporan	2 Laporan	70%	21.822.500	0	0,00
	<b>Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPd</b>	<b>3.</b>	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah yang sinkron dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>434.698.450</b>	<b>131.107.550</b>	<b>30,16</b>
		3.1	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang selaras dengan perencanaan daerah	100%	100%	100%	125.243.200	82.650.000	65,99
		3.1.1	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang pemerintahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	25 Dokumen	25 Dokumen	100%	58.225.700	31.250.000	53,67

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)	
		3.1.2	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang pembangunan manusia yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	50 Dokumen	50 Dokumen	100%	67.017.500	51.400.000	76,70
		3.2	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA yang selaras dengan perencanaan daerah	100%	95%	95%	152.431.750	15.017.550	9,85
		3.2.1	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	60 Dokumen	60 Dokumen	100%	45.284.700	5.525.000	12,20
		3.2.2	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah kota Banda Aceh	1 Laporan	1 Laporan	85%	74.852.550	6.440.050	8,60
		3.2.3	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang SDA yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	30 Dokumen	30 Dokumen	100%	32.294.500	3.052.500	9,45

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)	
		3.3	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan wilayah yang selaras dengan perencanaan daerah	100%	100%	157.023.500	33.440.000	21,30	
		3.3.1	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang infrastruktur yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	30 Dokumen	30 Dokumen	34.072.500	30.777.500	90,33	
		3.3.2	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanan pembangunan nasional bidang infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan	94.691.000	0	0,00	
		3.3.3	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang wilayah yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	25 Laporan	25 Laporan	28.260.000	2.662.500	9,42	
	<b>Persentase Indikator Kinerja dalam</b>	<b>4.</b>	<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan daerah yang didasarkan pada hasil analisa penelitian dan pengembangan</b>	<b>80%</b>	<b>55%</b>	<b>68.75%</b>	<b>1.203.917.700</b>	<b>310.257.000</b>	<b>25,77</b>

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)	
	<b>RPJMD yang mencapai target</b>	4.1	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tersedianya dokumen penelitian pengembangan bidang sosial dan kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	154.534.500	93.650.000	60,60
		4.1	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tersedianya dokumen penelitian pengembangan bidang social dan kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	154.534.500	93.650.000	60,60
		4.1.1	Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	154.534.500	93.650.000	60,60
		4.2	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan	Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	6 Dokumen	2 Dokumen	50%	547.250.700	116.357.000	21,26
		4.2.1	Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah	Jumlah laporan survey pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah	2 Laporan	-	-	139.526.900	5.000.000	3,58
		4.2.2	Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan penelitian bidang lingkungan hidup	2 Laporan	-	-	199.202.900	10.000.000	5,02
		4.2.3	Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah laporan hasil survey Indeks Kota Layak Huni	1 Laporan	1 Laporan	107.623.400	1.557.000	1,45	

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)	
		4.2.4	Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah laporan penelitian bidang penataan ruang dan pertanahan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100.897.500	99.800.000	98,91
		4.3	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tersedianya dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	2 Dokumen	2 Dokumen	80%	<b>502.132.500</b>	<b>100.250.000</b>	<b>19,96</b>
		4.3.1	Sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah laporan penelitian dibidang teknologi dan informasi	2 Laporan	1 Laporan	60%	401.882.500	0	0,00
		4.3.2	Sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah laporan Informasi Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	3 Laporan	3 Laporan	100%	100.250.000	100.250.000	100,00

Berdasarkan Tabel di atas Bappeda Kota Banda Aceh memiliki 1 (satu) sasaran strategis Aceh yaitu Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif dan terdapat 3 (tiga) indikator sasaran, yaitu:

1. Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD.

Indikator ini di dukung oleh Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 115.52 % hal ini disebabkan adanya konsistensi program RKPD dengan RPJM tahun 2021.

2. Persentase OPD yang renjanya selaras dengan RKPD

Indikator ini di dukung oleh Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100%, karena bidang-bidang koordinasi di Bappeda telah melakukan asistensi juga pendampingan untuk penyusunan dokumen Renja OPD sehingga selaras dengan dokumen RKPD.

3. Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target

Indikator ini didukung oleh Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 68.75%, hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 hanya 11 (sebelas) IKU RPJMD yang mencapai target dari 16 (enam belas) IKU RPJMD yang ditargetkan pada tahun 2021.

### **3.3 Akuntabilitas Keuangan**

Salah satu aspek akuntabilitas kinerja yang sangat penting adalah akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban institusi publik untuk menggunakan dana publik (public money) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas keuangan menjadi sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak internal dan pihak eksternal.

Anggaran Belanja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 sebelum Perubahan ditetapkan sebesar Rp.12.372.380.505,- dengan rincian belanja Operasi sebesar Rp.12.303.427.505,- dan belanja Modal sebesar Rp. 68.953.000,-. Pemerintah Kota Banda Aceh merevisi APBK TA.2021 melalui refocusing dan relokasi belanja non prioritas untuk dialihkan pada upaya percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19, sehingga Anggaran Belanja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 mengalami revisi, dimana Anggaran belanja Bappeda Perubahan ditetapkan sebesar Rp.



11.086.045.405,- yang dialokasi untuk belanja operasi sebesar Rp. 11.057.116.765,- dan belanja modal sebesar Rp. 28.928.650,-.

Sampai berakhirnya tahun anggaran 2021 realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bappeda cukup baik dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 9.349.027.544,- atau 84,33 persen dari alokasi anggaran belanja Bappeda. Anggaran belanja yang tidak terealisasi sebesar Rp. 1.737.017.861,- atau 15,67 persen, disebabkan karena adanya selisih harga nego, tidak dilaksanakan lagi kegiatan serta tidak dilakukan penarikan karena tidak ada kebutuhan lagi. Serta ada beberapa kegiatan yang pembayarannya harus tertunda dan dicatat sebagai utang pada neraca dan dibayarkan pada tahun anggaran 2022 dikarenakan rendahnya pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Banda Aceh yang disebabkan efek dari pandemic covid-19 sehingga berpengaruh pada pembayaran kegiatan pada akhir tahun anggaran.

Urusan pemerintah daerah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas pokok dan kewenangan yang dimilikinya. Pengalokasian belanja Program dan Kegiatan Bappeda tetap menggunakan pendekatan sistem skala prioritas dengan menfokuskan pada program untuk mendukung pelaksanaan program utama Urusan Wajib. Urusan Wajib adalah urusan yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Bappeda pada Tahun anggaran 2021 telah melaksanakan 4 (empat) Program dan 15 (lima belas ) kegiatan serta 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah dilaksanakan 5 (lima) kegiatan dan 12 Sub kegiatan

**2. Program Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Pada Program Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan.

**3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Pada Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan.

#### 4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Pada Program Penelitaian Dan Pengembangan Daerah, untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan.

Kinerja keuangan dapat diukur melalui:

1. Perbandingan antara realisasi dan rencana anggaran
2. Perbandingan realisasi antar periode

Perbandingan antara realisasi dan rencana anggaran tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini :

**Tabel. 3.5**  
**Perbandingan Antara Realisasi dan Rencana Anggaran**  
**Tahun Anggaran 2021**

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN REVISI/ PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ( Rp.)	%
1	2		3	4	5
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>6.864.446.255</b>	<b>6.584.066.394</b>	<b>95,92</b>
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>39.607.500</b>	<b>39.607.500</b>	<b>100,00</b>
	01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.607.500	39.607.500	100,00
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>6.091.240.905</b>	<b>6.037.633.270</b>	<b>99,12</b>
	02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.070.940.905	5.199.177.689	102,53
	02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.020.300.000	838.455.581	82,18
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>197.461.350</b>	<b>105.420.173</b>	<b>53,39</b>
	03.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Pembangunan Kantor	4.026.000	1.725.000	42,85
	03.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.928.650	28.928.650	100,00
	03.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.835.000	12.054.300	93,92
	03.04	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.671.700	62.712.223	41,35
4	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>413.528.000</b>	<b>310.916.151</b>	<b>75,19</b>
	04.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	314.080.000	238.095.151	75,81
	04.02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.448.000	72.821.000	73,23
5	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>122.608.500</b>	<b>90.489.300</b>	<b>73,80</b>
	05.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.199.000	56.089.800	69,94
	05.02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.659.500	18.649.500	69,95
	05.03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.750.000	15.750.000	100,00

1	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN REVISI/ PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ( Rp.)	%
2			3	4	5
II	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>2.582.983.000</b>	<b>2.323.596.600</b>	<b>89,96</b>
6	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>		<b>2.393.561.000</b>	<b>2.262.877.600</b>	<b>94,54</b>
	06.01	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	42.265.000	41.040.000	97,10
	06.02	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	207.866.000	165.118.600	79,44
	06.03	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2.143.430.000	2.056.719.000	95,95
7	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>109.795.000</b>	<b>40.744.000</b>	<b>37,11</b>
	07.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	109.795.000	40.744.000	37,11
8	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>79.627.000</b>	<b>19.975.000</b>	<b>34,56</b>
	08.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah diKabupaten/Kota	57.804.500	19.975.000	34,56
	08.02	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	21.822.500	0	0,00
III	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>434.698.450</b>	<b>131.107.550</b>	<b>30,16</b>
9	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>		<b>125.243.200</b>	<b>82.650.000</b>	<b>65,99</b>
	09.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	58.225.700	31.250.000	53,67
	09.02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang PembangunanManusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	67.017.500	51.400.000	76,70
10	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>		<b>152.431.750</b>	<b>15.017.550</b>	<b>9,85</b>
	10.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	45.284.700	5.525.000	12,20
	10.02	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	74.852.550	6.440.050	8,60
	10.03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	32.294.500	3.052.500	9,45
11	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>		<b>157.023.500</b>	<b>33.440.000</b>	<b>21,30</b>
	11.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	34.072.500	30.777.500	90,33
	11.02	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	94.691.000	0	0,00
	11.03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	28.260.000	2.662.500	9,42

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN REVISI/ PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ( Rp.)	%
1	2		3	4	5
		(RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>		<b>1.203.917.700</b>	<b>310.257.000</b>	<b>25,77</b>
<b>12</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>		<b>154.534.500</b>	<b>93.650.000</b>	<b>60,60</b>
	12.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	154.534.500	93.650.000	60,60
<b>13</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>		<b>547.250.700</b>	<b>116.357.000</b>	<b>21,26</b>
	13.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	139.526.900	5.000.000	3,58
	13.02	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	199.202.900	10.000.000	5,02
	13.03	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	107.623.400	1.557.000	1,45
	13.04	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	100.897.500	99.800.000	98,91
<b>14</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>		<b>502.132.500</b>	<b>100.250.000</b>	<b>19,96</b>
	14.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	401.882.500	0	0,00
	14.02	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	100.250.000	100.250.000	100,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>11.086.045.405</b>	<b>9.349.027.544</b>	<b>84,33</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat, dari empat program kegiatan yang dilaksanakan capaian realisasi tertinggi dari anggaran yang direncanakan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.6.864.446.255,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 6584.066.394 ,- atau 95,92 persen, anggaran yang tidak direalisasikan lagi sebesar 4,08 persen. Pada Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.2.582.983.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.323.596.600 ,- atau 89,96 persen. Sedangkan pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah hanya terealisasi sebesar 30,16 persen, dan Program Penelitaian Dan Pengembangan Daerah terealisasi sebesar 25,77 persen dari rencana anggaran yang ditargetkan.

Secara keseluruhan persentase realisasi belanja Bappeda Tahun anggaran 2021 sebesar 84,33 persen mengalami penurunan dibandingkan dengan anggaran 2020. Hal ini disebabkan efek dari rendahnya pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Banda Aceh sehingga berpengaruh besar terhadap Likuiditas Kas

Pemerintah Kota Banda Aceh untuk kelancaran pembayaran Belanja Daerah sehingga menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dibayarkan pada tahun berjalan namun akan dibayar pada tahun 2021 dan dicatat sebagai utang belanja barang dan jasa di neraca tahun anggaran 2022. Namun Selama 5 (lima) tahun terakhir rasio antara anggaran dan realisasi belanja rata-rata persentasenya sebesar 92,58 persen pertahunnya, ini menunjukkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang direncanakan. Perkembangan realisasi anggaran Bappeda Tahun Anggaran 2017-2021 dapat dilihat pada table 3.6 berikut

**Tabel 3.6**  
**Perkembangan Realisasi Anggaran Belanja**  
**Bappeda Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2017 s/d 2021**

URAIAN	RASIO ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI %				
	2017	2018	2019	2020	2021
<b>BELANJA</b>	<b>93,79</b>	<b>94,39</b>	<b>92,72</b>	<b>97,66</b>	<b>84,33</b>
BELANJA PEGAWAI	96,02	94,01	96,08	103,51	102,53
BELANJA BARANG DAN JASA	91,14	93,90	88,63	88,39	68,84
BELANJA MODAL	99,51	99,30	99,79	91,40	100,00

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kinerja Bappeda tahun 2021 dalam merealisasikan anggaran belanja menunjukkan penurunan realisasi dari tahun 2020.

### 3.4 Keberhasilan dan Hambatan

Ada beberapa faktor penting yang menjadi pemicu keberhasilan Bappeda sebagai organisasi dalam mencapai target-target kinerja ditahun 2021 antara lain:

1. Komitmen dan semangat dari ASN di lingkungan Bappeda terkait pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan.
2. Dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai di lingkungan Bappeda dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara keseluruhan.
3. Adanya hubungan yang cukup baik antara Bappeda dengan pihak lain khususnya perangkat daerah lainnya dalam menjalankan fungsi koordinasi.
4. Adanya pemanfaatan teknologi informasi mulai dari system informasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi.

Adapun faktor yang menghambat dalam pencapaian target kinerja Bappeda tahun 2021 antara lain:

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perencanaan
2. Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar OPD serta *stakeholders* terkait
3. Minimnya pelatihan perencanaan pembangunan
4. Keterbatasan ketersediaan data perencanaan pembangunan
5. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi hasil (*outcome*) pembangunan
6. Minimnya penelitian perencanaan pembangunan

Berdasarkan beberapa kendala dan hambatan utama tersebut, solusi yang perlu dilakukan antara lain:

1. Memanfaatkan sumber daya (SDM) yang ada untuk tetap bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Sejalan dengan itu juga mulai diusulkan jumlah pegawai yang dibutuhkan kepada perangkat daerah yang membidangi yaitu BKPP.
2. Mengoptimalkan koordinasi antar OPD serta *stakeholders* terkait.
3. Mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat khususnya terkait perencanaan.
4. Meningkatkan koordinasi kepada produsen data perencanaan agar dapat menghasilkan data yang valid, up to date, dan berkesinambungan.
5. Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi program kegiatan pembangunan sebagai salah satu penentu keberhasilan perencanaan pembangunan daerah.
6. Meningkatkan penelitian perencanaan pembangunan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2021 menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja Institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Bappeda Kota Banda Aceh, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban Bappeda Kota Banda Aceh untuk kepentingan internal dan kepentingan eksternal (publik) dalam upaya mendorong akuntabilitas institusi pemerintahan. Bagi kepentingan internal, LKjIP dapat dijadikan instrumen untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran strategis yang menunjukkan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2021. Sementara bagi kepentingan eksternal (publik), LKjIP menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan Bappeda Kota Banda Aceh dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam perencanaan pembangunan.

Secara keseluruhan hasil pencapaian kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2021 dapat terlihat dari rata-rata persentase realisasi terhadap target indikator sasaran pada tahun 2021 mencapai 94.75%, yang berarti bahwa Skala Nilai Peringkat Kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2021 berada pada kriteria **sangat tinggi**. Namun keberhasilan pencapaian target indikator sasaran strategis Bappeda Kota Banda Aceh sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan dunia usaha sebagai bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari sistem perencanaan pembangunan. Oleh karena itu peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga sasaran strategis yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Banda Aceh periode Tahun 2017-2022 dapat terwujud.

